SKRIPSI

PENERAPAN E-GOVERNMENT PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KAPUAS HULU

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Oleh :

Christogonus Elvos

NIM. E1032201053

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2025

LEMBAR PERSETUJUAN

PENERAPAN E-GOVERNMENT PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KAPUAS HULU

Tanggung Jawab Yuridis Pada:

Christogonus Elvos

NIM. E1032201053

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing Utama

Tanggal : 22 - 01 - 25

Prof. Dr. H. Martoyo, MA
NIP. 196010031986031003

Dosen Pembimbing Pendamping

Tanggal : 10 - 01 - 25

Rufida Yuniarsih, S.IP, M.Si
NIP. 198306272006042020

HALAMAN PENGESAHAN

PENERAPAN E-GOVERNMENT PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KAPUAS HULU

Oleh:

Christogonus Elvos
NIM. E1032201053

Dipertahankan di : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Pada Hari / Tanggal : Jumat, 28 Februari 2025
Pukul : 09.00 WIB - Selesai
Tempat : Ruang Sidang 4

Tim Penguji

Ketua

Prof. H. Martoyo, M.A
NIP. 196010031986031004

Sekretaris

Rulida Yuniarsih, S.IP, M.Si
NIP. 198306272006042020

Pembahas Utama

Bima Sujendra, S.IP, M.Si
NIP. 198805072014041002

Pembahas Pendamping

Haunan Fachry Rohilie,S.IP. M.A
NIP. 199003182019010l0

Disahkan oleh
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjung Pura

Dr. Herlan, M.Si
NIP. 197205212006041001

ABSTRAK

Christogonus Elvos : Penerapan E-Government Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kapuas Hulu. Skripsi. Program Studi Ilmu Pemerintahan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjung Pura Pontianak 2025.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *e-government* Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas Hulu, khususnya pada *website* pemerintah daerah. Penerapan e-government adalah salah satu bentuk inovasi dalam pelayanan publik, e-government memungkinkan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat diakses dengan mudah serta memiliki sifat fleksibilitas karena tidak dibatasi oleh jam kerja kantor instansi terkait. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Penelitian ini menekankan pada tiga indikator utama elemen sukses penerapan e-government menurut teori Richardus Eko Indrajit, yaitu elemen support, capacity, dan value. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penerapan e-government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas Hulu masih dalam tahap pengembangan dan belum dapat berjalan dengan optimal, terdapat beberapa keterbatasan yang menghambat optimalisasi penerapan e-government pada Dinas Komunikasi dan Informatika yakni, keterbatasan dana, kurang memadainya fasilitas penunjang e-government pada instansi pemerintah daerah, kurang memadainya infrastruktur telekomunikasi pada wilayah-wilayah Kabupaten Kapuas Hulu dan keterbatasan sarana dan prasarana. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap optimalisasi penerapan e-government pada Dinas Komunikasi dan Informatika dan juga sebagai referensi penelitian terkait penerapan e-government.

Kata kunci: Penerapan e-government, optimalisasi, fasilitas.

ABSTRACT

Christogonus Elvos: The Implementation of E-Government in the Department of Communication and Informatics, Kapuas Hulu Regency. *Thesis. Government Science Study Program, Department of Administration Sciences, Faculty of Social and Political Sciences, Tanjung Pura University, Pontianak 2025.*

This study aims to analyze the implementation of e-government in the Department of Communication and Informatics of Kapuas Hulu Regency, specifically on the regional government's website. E-government implementation is one form of innovation in public services. It allows the public services provided by the regional government to be easily accessible and flexible, as they are not restricted by the office hours of the related agency. In this research, the researcher uses a qualitative descriptive research method with interviews, observation, and documentation as data collection techniques. This research emphasizes three main indicators of successful e-government implementation according to Richardus Eko Indrajit's theory: support, capacity, and value elements. The results of this study indicate that the implementation of e-government in the Department of Communication and Informatics of Kapuas Hulu Regency is still in the development stage and has not yet been fully optimized. Several limitations hinder the optimization of e-government implementation, including limited funds, inadequate supporting facilities for e-government in regional government agencies, insufficient telecommunication infrastructure in areas of Kapuas Hulu Regency, and limited resources and infrastructure. This research is expected to contribute to the optimization of e-government implementation in the Department of Communication and Informatics and also serve as a reference for related research on egovernment implementation.

Keywords: E-government implementation, optimization, facilities

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA UPT. BAHASA

RINGKASAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul "Penerapan *e-Government* Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas Hulu". Judul ini dipilih peneliti sebagai penelitian berdasarkan permasalahan yang ada pada penyelenggaraan pelayanan publik berbasis *e-government* atau SPBE (sistem pemerintahan berbasis elektronik) khususnya yang bentuk pelaksanaannya terletak pada website pemerintah daerah yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas Hulu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan *e-government* Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas Hulu.

Berdasarkan tujuan tersebut yaitu untuk menganalisis penerapan e-government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas Hulu, maka peneliti menggunakan teori menurut Richardus Eko Indrajit dalam buku *E-Government in Action* (2016, 11-12) elemen sukses penerapan e-government yang memiliki tiga indikator yakni elemen *support* (dukungan), *capacity* (kapasitas), dan *value* (nilai).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah itu peneliti menganalisis data dengan mereduksi/analisis data, display data, dan melakukan penarikan kesimpulan. Untuk memeriksa keabsahan data peneliti menggunakan triangulasi sumber.

Data yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas Hulu sebagai pihak penyelenggara dan masyarakat sebagai pengguna layanan, beberapa pihak dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas Hulu yang peneliti wawancarai yakni Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Bidang Statistika dan Aplikasi, dan Pranata Ahli Komputer, serta beberapa masyarakat setempat di Kabupaten Kapuas Hulu tepatnya di Putusibau Utara. Peneliti juga melakukan observasi lapangan dan observasi pada website pemerintah daerah yang diteliti.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *e-government* pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas Hulu belum berjalan optimal dikarenakan adanya keterbatasan dana, kurangnya fasilitas penunjang e-government pada instansi pemerintah daerah, dan kurangnya infrastruktur telekomunikasi pada wilayah-wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, permasalahan tersebut harus dapat diatasi untuk penerapan *e-government* yang optimal.

Adapun saran dari penelitian ini adalah perlu adanya keseriusan dari pemerintah daerah diikuti dengan koordinasi yang baik dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas Hulu. Pemerintah daerah tentu harus dapat menyediakan infrastruktur telekomunikasi yang memadai agar memudahkan masyarakat dalam mengakses website milik pemerintah daerah dan juga ketersediaan infrastruktur telekomunikasi yang memadai dapat memudahkan sosialisasi kepada masyarakat sebagai pengenalan sistem pelayanan publik berbasis elektronik, dan juga memberikan ketersediaan dana yang memadai agar dapat menunjang penerapan e-government secara optimal.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Christogonus Elvos

Nomor Induk Mahasiswa : E1032201053

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Jenjang Studi : Strata Satu (S-1)

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya dalam Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 7 Januari 2025

Yang membuat pernyataan

Christogonus Elvos

NIM. E1032201053

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

"Life is not only about winning trophies. Sometimes you learn more from defeats"

(Sir Alex Ferguson)

Persembahan:

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Skripsi ini diperuntukkan kepada Keluarga Kecilku yang sangat luar biasa yang selalu mendidik untuk belajar mandiri, bebas memilih jati diri, mendukung dan selalu mendoakan anak dalam situasi apapun. Terima kasih tak terhingga untuk Bapak **Bianor Evodius Stanley** dan Ibu **Margaretha Angela** dimana selama perkuliahan ini selalu memberikan semangat dan materinya untuk saya agar bisa menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik.
2. Tidak lupa juga kepada adik saya, **Fabrizio Angelito** yang menjadi motivasi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan ini secepat mungkin.
3. Skripsi ini juga diperuntukkan kepada anggota keluarga saya yang lainnya Bibi saya **Franny Octaviany**, Almarhum Kakek saya **Fransiskus Xaverius Biray**, Nenek saya tercinta Nenek **Agatha Maria Elisabeth** yang selalu merawat, peduli, perhatian dan mendidik saya dari kecil hingga sekarang dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala semua kekhawatiranya selama ini baik sekecil apapun itu sangat berharga bagi saya. Dan terima kasih telah menjadi salah satu motivasi serta pendukung terbaik selama saya berproses didunia pendidikan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **"Penerapan e-government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas Hulu"** yang merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Ilmu Pemerintahan.

Selama proses penyelesaian skripsi tidak terlepas dari berbagai bantuan pihak yang memberikan bantuan dan dukungan dalam bentuk materi, moril, motivasi juga inspirasi. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Dr. Herlan, S.Sos., M.Si. selaku Dekan fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.
2. Dr. Ira Patriani, S.IP, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.
3. Bima Sujendra, S.IP, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura sekaligus dosen pembahas utama yang telah memberikan masukan dan sarannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Prof.H.Martoyo,M.A selaku dosen pembimbing utama yang selalu memberikan bimbingan, arahan, serta dorongan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Rulida Yuniarsih, S.IP, M.Si selaku dosen pembimbing pendamping dan dosen pembimbing akademik (PA) yang juga selalu memberikan bimbingan, arahan, serta dorongan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Haunan Fachry Rohilie, S.I.P, M.A selaku dosen pembahas pendamping yang telah memberikan masukan dan sarannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada Operator Jurusan Ilmu Administrasi yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, yang telah banyak membantu dalam pelayanan berkas akademik sehingga mempermudah penulis dalam mengurus semua berkas yang diperlukan dalam perkuliahan.
8. Kepada semua Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, yang telah memberikan ilmu serta masukan kepada penulis.
9. Kepada kedua Orang tua saya Bapak Bianor Evodius Stanley dan Ibu Margaretha Angela dan adik saya Fabrizio Angelito yang sangat penulis sayangi dan kasihi yang tak henti-hentinya memberikan doa, dukungan,
10. Kepada semua sahabat sekaligus keluargaku selama di perantauan (NAZI grup, MINDSET grup, dan Next Trip Lemukutan grup) yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang banyak membantu, memberikan dukungan serta semangatnya dari awal perkuliahan hingga penulis menyelesaikan Skripsi ini

11. Kepada teman-teman prodi Ilmu Pemerintahan Angkatan 2020 yang telag membersamai selama perkuliahan dan selalu memberikan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam penyusunan Skripsi namum sebagai manusia tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan. Oleh karena itu dengan penuh rasa rendah hati penulis menerima kritikan dan saran yang sifatnya membangun. Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat pada pembacanya.

Pontianak, 7 Januari 2025

Christogonus Elvos

E1032201053

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PERSETUJUAN ..... **i**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **ii**

ABSTRAK ..... **iii**

ABSTRACT ..... **iv**

RINGKASAN SKRIPSI ..... **v**

PERNYATAAN KEASLIAN ..... **vii**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **viii**

KATA PENGANTAR ..... **ix**

DAFTAR ISI ..... **xii**

DAFTAR TABEL ..... **xv**

DAFTAR GAMBAR ..... **xvi**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xvii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1Latar Belakang 1

1.2Identifikasi Masalah 11

1.3Fokus Penelitian 12

1.4Rumusan Masalah 12

1.5Tujuan Penelitian 12

1.6Manfaat Penelitian 12

1.6.1Manfaat Teoritis 12

1.6.2Manfaat Praktis 13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 14

2.1Definisi Konsep 14

2.1.1*E-Government* 14

2.1.2Penerapan E-Government 16

2.1.3Elemen Sukses Penerapan E-Government 18

2.1.4Hasil Penelitian yang Relevan 19

2.1.5Kerangka Pikir Penelitian 20

2.1.6Asumsi/Pertanyaan Penelitian 22

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 23

3.1Jenis Penelitian 23

3.2Langkah-langkah Peneltian 25

3.3Lokasi dan Waktu Penelitian 26

3.4Subjek dan Objek Penelitian 27

3.5Teknik Pengumpulan Data 28

3.6Instrumen atau Alat Pengumpulan Data 29

3.7Analisis Data 29

3.7.1Keabsahan Data 29

3.7.2Teknik Analisis Data 30

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 32

4.1Gambaran Umum Lokasi Penelitian Kabupaten Kapuas Hulu 32

4.1.1Kondisi Geografi 33

4.1.2Kondisi Kependudukan Demografi 40

4.1.3Gambaran Umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas Hulu 43
4.1.4Visi, Misi dan Tujuan 49
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 51
5.1Penerapan *E-Government* pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas Hulu. 51
5.2Pembahasan 54
5.2.1Element *Support* (Dukungan) 54
5.2.2 Capital 61
5.2.3 Cyber laws 65
5.2.4 Connectifity 65
5.3*Capacity* (Kemampuan) 68
5.3.1 Content development 71
5.3.2 Competency building 74
5.3.3 Citizen interfaces 75
5.4 Value (Manfaat) 76
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 78
6.1Kesimpulan 78
6.2Saran 79
6.3Keterbatasan Penelitian 79
DAFTAR PUSTAKA 81

DAFTAR TABEL

Tabel **Halaman**

Tabel 4.1 Luas wilayah Kabupaten Kapuas Hulu per Kecamatan 34

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Tahun 2022 (Kelompok Umur) 41

Tabel 4.3 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas Hulu 44

Tabel 5.1 Ketersediaan Jangkauan Telekomunikasi Kabupaten Kapuas Hulu 57

Tabel 5.2 Sarana dan Prasarana Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas Hulu 60

Tabel 5.3 RKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu 62

Tabel 5.4 Jumlah Menara Telekomunikasi berdasarkan bantuan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. 66

Tabel 5.5 Jumlah Akses Internet Berdasarkan Bantuan dari KOMINFO .. 66

Tabel 5.6 Jumlah Pegawai ASN dan PPPK Berdasarkan Tingkat Pendidikan 68

Tabel 5.7 Daftar Alamat Website Kecamatan Pada Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu 70

DAFTAR GAMBAR

Gambar **Halaman**

GAMBAR 1.1 Halaman Layanan Perizinan Usaha Kabupaten Kapuas Hulu 7

GAMBAR 1.2 Domain Pelayanan Disdukcapil Kabupaten Kapuas Hulu..... 8

GAMBAR 1.3 Domain Informasi Layanan Publik SIPP Menpan Kabupaten Kapuas hulu..... 9

GAMBAR 1.4 Jumlah WEB Kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu..... 10

Gambar 4.1 Peta Administrasi Kabupaten Kapuas Hulu 35

Gambar 5.1 Laman Website Resmi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu 53

Gambar 5.2 Jumlah akses website Pemerintah Daerah..... 59

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran **Halaman**

Lampiran 1 PEDOMAN WAWANCARA 84

Lampiran 2 PEDOMAN OBSERVASI 86

Lampiran 3 DOKUMENTASI 87

Lampiran 4 DAFTAR RIWAYAT HIDUP 90

Lampiran 5 SURAT TUGAS PENELITIAN 91

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan *E-Government* menetapkan *E-Government* sebagai mekanisme interaksi antara pemerintah dengan masyarakat melalui sistem informasi berbasis internet dan teknologi digital dengan tujuan memperbaiki mutu dan kualitas pelayanan publik yang efisien, transparan, dan efektif. Inpres ini juga mendorong pembentukan hubungan interaktif antara pemerintah dan dunia usaha untuk meningkatkan perkembangan perekonomian nasional dan memperkuat kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional, dan inpres ini juga menekankan pentingnya mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan negara.

Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan *E-Government* hanyalah awal dari keseriusan pemerintah Indonesia terhadap pelaksanaan *E-Government* selanjutnya ada pada Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang memiliki poin penting yakni, Perpres ini mengatur tentang penggunaan aplikasi dan infrastruktur teknologi informasi yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pemerintah berbasis

elektronik dan tujuan utama pembuatan peraturan ini adalah memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

Selanjutnya adalah kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dalam upaya melaksanakan dua peraturan dari Pemerintah Pusat yakni dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati nomor 5 tahun 2013 tentang pengembangan *E-Government* Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan telekomunikasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, selain itu peraturan ini juga bertujuan memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif, dengan adanya peraturan ini juga diharapkan terjadi perbaikan organisasi, sistem manajemen, dan proses kerja pemerintahan.

Dari kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah khusunya disini ialah pemerintah kabupaten kapuas hulu dapat diketahui bahwa ada upaya dari pemerintah untuk memperbaiki dan mengoptimalkan penerapan *E-Government*.

E-Government juga memiliki arti yakni suatu bentuk interaksi pemerintah kepada masyarakatnya melalui teknologi digital dan komunikasi, fungsi dari *E-Government* adalah memudahkan masyarakat untuk mengakses jasa-jasa layanan publik milik pemerintah seperti KTP elektronik, E-Kelurahan, BPJSTKU mobile, pendaftaran izin usaha online dan lain-lain. Kehadiran

website pemerintah sangat penting karena menjadi jembatan bagi masyarakat dalam berinteraksi yang dilaksanakan secara daring.

Kini era globalisasi telah berkembang begitu pesat, setiap tahun selalu ada gebrakan penemuan teknologi informasi yang semakin canggih dan hemat biaya, hal ini membuat efisiensi yang ditawarkan menjadi semakin menarik minat masyarakat.

Di era globalisasi sekarang di mana teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat tentu mempengaruhi berbagai sektor kehidupan termasuk di bidang pemerintahan yang diwujudkan dalam sebuah sistem yang disebut *Electronic Government* (E-Gov), *E-Government* merupakan suatu sistem yang di mana pemerintah memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan yang baik dalam memberikan pelayanan, pengelolaan keuangan, dan perumusan kebijakan.

Sebagai gambaran banyak negara yang telah beralih dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanannya dari cara tradisional ke cara yang memanfaatkan teknologi informasi yang dapat diakses secara daring, termasuk Indonesia telah mengadopsi konsep *E-Government* sebagai upaya meningkatkan kinerja pemerintahan.

Semakin besarnya peran teknologi informasi dan komunikasi dalam proses bisnis yang dilakukan oleh pihak swasta membuat banyak lembaga pemerintahan mengupayakan untuk mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan yang terintegrasi, berdasarkan hasil evaluasi pengembangan *E-Government* di Indonesia masih

dijumpai banyak masalah yang secara umum berasal dari kesalahan pandangan atau paradigma mengenai *E-Government* salah satunya adalah ketidaksiapan pegawai pemerintah dan masyarakat dalam beradaptasi dari pelayanan manual ke pelayanan secara daring. Faktor teknis dan non teknis penghambat *E-Government* juga telah di identifikasi dalam beberapa kajian, interoperabilitas antar aplikasi juga menjadi tuntutan mendesak dalam pengembangan *E-Government* di Indonesia, hal ini disebabkan oleh kebutuhan data multisektoral dalam rangka pengambilan kebijakan untuk mengatasi masalah data dari antar sektor yang terkait.

Permasalahan umum yang ditemukan tidak terlepas dari permasalahan klasik yang hampir semuanya terjadi di seluruh wilayah Indonesia, seperti fasilitas sarana jaringan (server), kapasitas SDM dan pemahaman publik terhadap layanan *E-Government* itu sendiri. Permasalahan yang disebutkan menunjukkan permasalahan sarana menjadi kendala dalam layanan *E-Government.*

Pada penelitian ini instansi pemerintahan yang dituju adalah pemerintah daerah kabupaten Kapuas Hulu dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas Hulu, berdasarkan regulasi yang penulis gunakan yakni Peraturan Bupati Kapuas Hulu No. 5 Tahun 2013 tentang pengembangan *e-government* pemerintah kabupaten kapuas hulu dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu No. 56 Tahun 2020 tentang dokumen perencanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) serta tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas Hulu diketahui bahwa wewenang

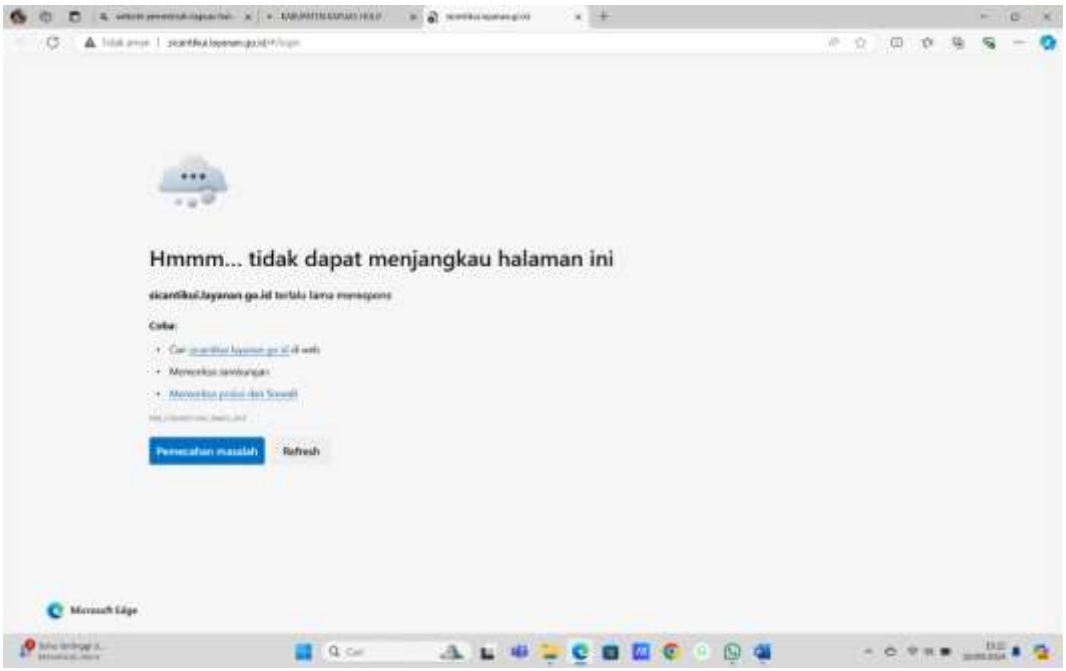
pelaksanaan *E-Government* pada wilayah kabupaten Kapuas Hulu terletak pada OPD daerah seperti yang tertuang pada Peraturan Bupati No. 56 Tahun 2020 tentang Dokumen Perencanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Bab 1 Pasal 1 Poin ke lima, dalam pelaksanaannya OPD daerah ini berada dalam naungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas Hulu, sedangkan penganggaran dana pelaksanaan *e-government* terletak pada Peraturan Bupati No. 5 Tahun 2013 tentang pengembangan *e-government* Bab 5 Pasal 7 perihal pembiayaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, dalam tugas pokok dan fungsi dari dinas komunikasi dan informatika kabupaten kapuas hulu yakni dinas komunikasi dan informatika memiliki tugas dalam membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah, fungsi daripada dinas komunikasi dan informatika kabupaten kapuas hulu adalah perumusan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian, pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian, pelaksaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian, pelaksanaan administrasi dinas, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah dan juga dinas komunikasi dan informatika kabupaten

kapuas hulu memiliki hubungan koordinasi dalam pelaksanaan *e-Government* dalam ruang lingkup wilayah kabupaten kapuas hulu.

Sebelum adanya website pemerintah daerah pelaksanaan pelayanan publik hanya dilakukan secara manual, masyarakat datang langsung ke instansi terkait dan melakukan pelayanan secara manual, tentunya sistem pelayanan seperti ini memakan waktu yang lebih lama tidak efektif dan efisien.

Penerapan *e-government* pada suatu lembaga pemerintahan/instansi menjadi penting selain memudahkan pegawai pemerintahan itu sendiri juga mempermudah masyarakat setempat, manfaat lain yang dapat diperoleh yaitu memperoleh informasi secara akurat,cepat, dan dapat dipertanggung jawabkan, serta selalu terkini. Proses konversi data dengan input manual menjadi format digital, disimpan pada sebuah database, dan di integrasikan ke dalam aplikasi terkomputerisasi, membentuk satu sistem informasi berbasis website. Sistem ini dirancang guna memudahkan penggunaan melalui perangkat seluler dan fleksibel sesuai kebutuhan pemerintah untuk lebih efisien dalam manajemen sumber daya manusia.

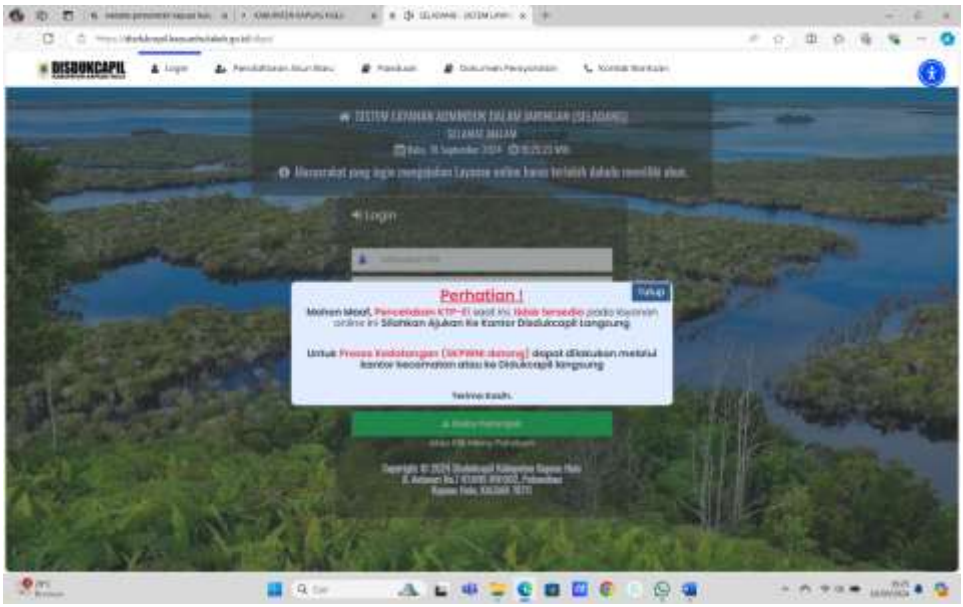
GAMBAR 1.1 Halaman Layanan Perizinan Usaha Kabupaten Kapuas Hulu



Sumber : http://sicantikui.layanan.go.id/#/login

Gambar 1.1 merupakan halaman *website* pemerintah daerah yang menaungi pendaftaran untuk perizinan usaha dapat dilihat bahwa dikarenakan *down server* halaman ini tidak dapat diakses.

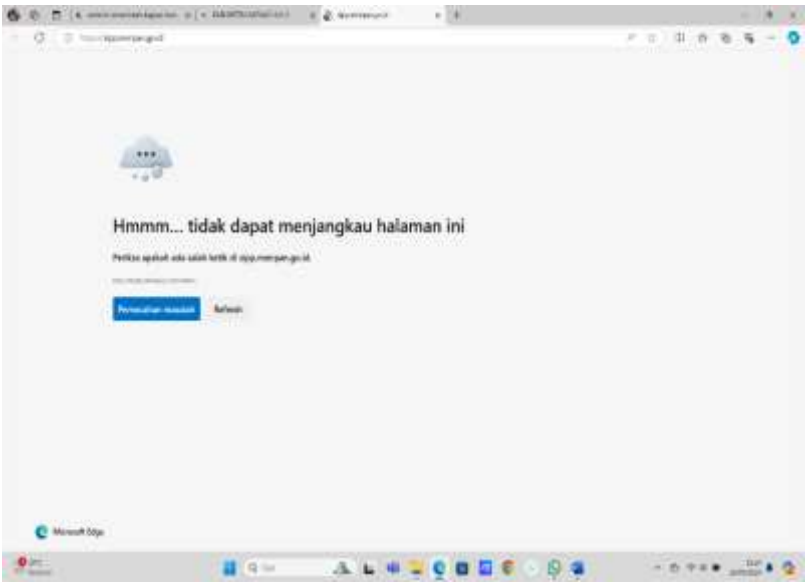
GAMBAR 1.2 Domain Pelayanan Disdukcapil Kabupaten Kapuas Hulu



Sumber : [SELADANG - SISTEM LAYANAN ADMINDUK DALAM JARINGAN (kapuashulukab.go.id)]

Gambar 1.2 dapat dilihat bahwa sistem pelayanan layanan kependudukan mengalami down server yang menyebabkan halaman website ini tidak dapat diakses dan mengharuskan pelayanan kembali dilakukan secara manual.

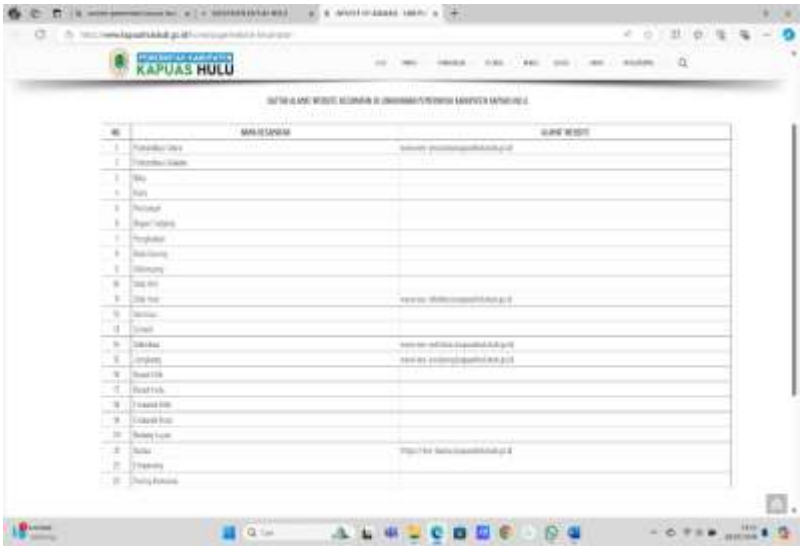
GAMBAR 1.3 Domain Informasi Layanan Publik SIPP Menpan Kabupaten Kapuas hulu



Sumber : sipp.menpan.go.id

Gambar 1.3 merupakan layanan SIPP Menpan (sistem informasi pelayanan publik kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi). SIPP merupakan media informasi elektronik yang memiliki fungsi sebagai media yang menyimpan dan mengelola informasi, menyampaikan informasi dari penyelenggara pelayanan publik kepada masyarakat. Dapat dilihat bahwa website milik pemerintah daerah mengalami *down server* yang mengakibatkan layanan tersebut tidak dapat diakses.

GAMBAR 1.4 Jumlah WEB Kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu



Sumber : [WEBSITE KECAMATAN - KABUPATEN KAPUAS HULU (kapuashulukab.go.id)]

Gambar 1.4 merupakan jumlah halaman *website* kecamatan yang terintegrasi dengan *website* pemerintah daerah kabupaten kapuas hulu, dapat dilihat bahwa hanya ada lima *website* kecamatan yang terintegrasi dengan *website* milik pemerintah daerah kabupaten kapuas hulu.

Melalui dari beberapa gambar di atas menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten kapuas hulu sudah menerapkan sistem *e-Gov* dalam bentuk *Website* dalam upaya memperluas jangkauan pelayanan publik, akan tetapi sebagaimana yang telah diungkapkan penulis bahwa terdapat beberapa masalah yang dialami oleh pemerintah daerah kabupaten kapuas hulu dalam menerapkan sistem *e-Gov* yakni permasalahan server, pemerataan fasilitas penunjang dan ketersediaan infrastruktur telekomunikasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan *E-Government* pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas hulu sesuai dengan yang di amanatkan baik oleh pemerintah pusat dalam bentuk Inpres No. 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan *E-Government* dan Perpres No. 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dan juga pemerintah daerah dalam bentuk Perbub No. 5 tahun 2013 tentang cetak biru (Blue Print) pengembangan *E-Government* pemerintah kabupaten kapuas hulu dan Perbub No. 56 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Penelitian ini menggunakan tiga indikator elemen sukses penerapan e-Government dalam buku *e-government in action* Indrajit (2016, 11-12) yang mempunyai tiga indikator utama yakni : *support, capacity, dan value*.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah di paparkan, maka peneliti mengidentifikasi beberapa masalah yang terjadi yaitu:

1. Tidak memadainya fasilitas penunjang baik sarana dan prasarana dalam pelaksanaan e-government.
2. Tidak meratanya infrastruktur telekomunikasi pada wilayah-wilayah kabupaten kapuas hulu.
3. Tidak stabilnya server yang menyebabkan halaman website tidak dapat diakses.

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti memfokuskan penelitian pada penerapan e-government melalui website pemerintah daerah yang di kelola Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas Hulu.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka masalah yang akan diteliti adalah "Bagaimana optimalisasi penerapan *e-government* melalui website milik Pemerintah Daerah oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas Hulu"

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah Mengetahui dan Menganalisis penerapan *E-Government* pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas Hulu dalam bentuk *Website.*

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang masalah dan tujuan penelitian, maka diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan akademik ilmiah, khususnya bagi peneliti sendiri, dan juga dapat menjadi referensi bagi civitas akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Tanjungpura Pontianak dalam memperkaya teori dan wawasan Ilmu Sosial khususnya pada studi kasus penerapan e-government dalam bentuk website milik Pemerintah Daerah.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Instansi

   Hasil penelitian ini diharapkan memberikan gagasan atau inovasi baru yang dapat meningkatkan optimalisasi penerapan *e-government* terutama bagi instansi Pemerintah Daerah melalui *website.*

2. Bagi Mahasiswa

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan atau referensi dalam meneliti studi kasus penerapan *e-government* terutama yang berada dalam ruang lingkup Pemerintahan Daerah.

3. Bagi Masyarakat

   Hasil penelitian ini sekiranya dapat menambah wawasan, informasi maupun pengetahuan bagi masyarakat terutama dalam topik penerapan *e-government* dalam bentuk *website* Pemerintah Daerah.